



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI
KE PROVINSI JAWA TENGAH
PADA RESES MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2023 – 2024**

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 58 ayat (3) huruf f Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

III. Susunan Tim

No	Nama	Keterangan
1.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	KETUA TIM/KETUA KOMISI III/F-PDIP
2.	DEDE INDRA PERMANA, S.H.	ANGGOTA TIM/F-PDIP
3.	H. GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., L.L.M.	ANGGOTA TIM/F-PDIP
4.	H. AGUSTIAR SABRAN, S.Kom	ANGGOTA TIM/F-PDIP
5.	Dr. H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	ANGGOTA TIM/F-P.GOLKAR
6.	Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T.	ANGGOTA TIM/F-P.GOLKAR
7.	DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F-P.GOLKAR
8.	Hj. SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F-P.GERINDRA
9.	Hj. EVA YULIANA, M. Si	ANGGOTA TIM/F-P.NASDEM
10	H. MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F-PKB
11	Dr. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.	ANGGOTA TIM/F-PKB
12	H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M.	ANGGOTA TIM/F-P.DEMOKRAT
13	HABIB ABOE BAKAR AL-HABSYI	ANGGOTA TIM/F-PKS
14	Komjen (Purn) Drs. H. ADANG DARADJATUN	ANGGOTA TIM/F-PKS
15	H. NAZARUDDIN DEK GAM	ANGGOTA TIM/F-PAN

Dalam tim kunjungan kerja ini Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Penghubung Mahkamah Agung.

IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 8- 12 Desember 2023 di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun Pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah.
2. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah
3. Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM RI.
4. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah
5. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

PENJELASAN KEPALA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI.

ANGGARAN

Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sampai dengan tanggal 04 Desember tahun 2023 dengan jumlah seluruh pagu anggaran (Kanwil & UPT) sebesar Rp. 632.950.576.000,- (Enam ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus tujuh enam ribu rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 571.654.108.633,- (Lima ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) atau sebesar 90.32%, dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 280,778,628,865,- realisasi belanja barang sebesar Rp. 241,700,152,686,- dan belanja modal sebesar Rp. 49,175,327,082,-

Target dan Realisasi PNBPN Tahun 2023

Target dan realisasi PNBPN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tahun 2023 sampai dengan bulan November 2023 adalah sebagai berikut:

TARGET DAN REALISASI PNBPN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2023
--

Kantor Wilayah

Target : 56.221.064.878

Realisasi : 67.987.906.922

UPT Pemasyarakatan

Target : 484.321.000

Realisasi : 2.110.539.948

UPT Keimigrasian

Target : 68.683.050.000

Realisasi : 162.552.937.799

Balai Harta Peninggalan

Target : 0

Realisasi : 18.786.593

BADIKLAT

Target : 0

Realisasi : 1.078.539.000

Total seluruh UPT

Target : 69.167.371.000

Realisasi : 165.760.803.340

Jumlah Keseluruhan

Target : 125.388.435.878

Realisasi : 233.748.710.262

Kebutuhan Anggaran

Kebutuhan anggaran tahun 2023 yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah:

- 1) Rehabilitasi Rumah Dinas pegawai terutama pada UPT Pemasyarakatan 105 Unit.
- 2) Penyediaan Rumah Susun pegawai di Nusakambangan maupun pegawai di Kota

Semarang (lahan sudah tersedia) sudah diusulkan melalui Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Pagu Anggaran Tahun 2024

Alokasi anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah tahun 2024

Anggaran Belanja Pegawai : 13.749.563.000

Anggaran Belanja Barang : 29.641.079.000

Anggaran Belanja Modal : 281.430.000

Jumlah : 43.672.072.000

UPT Pemasyarakatan

Anggaran Belanja Pegawai : 217.754.283.000

Anggaran Belanja Barang : 228.789.974.000

Anggaran Belanja Modal : 51.669.381.000

Jumlah : 552.213.638.000

UPT Keimigrasian

Anggaran Belanja Pegawai : 26.873.114.000

Anggaran Belanja Barang : 45.889.643.000

Anggaran Belanja Modal : 75.200.264.000

Jumlah : 147.973.021.000

BHP

Anggaran Belanja Pegawai : 2.201.817.000

Anggaran Belanja Barang : 4.595.085.000

Anggaran Belanja Modal : 2.9979.900.000

Jumlah : 9.776.802.000

Balai Diklat

Anggaran Belanja Pegawai	: 1.191.626.000
Anggaran Belanja Barang	: 8.594.857.000
Anggaran Belanja Modal	: -
Jumlah	: 9.786.483.000

Total seluruh UPT

Anggaran Belanja Pegawai	: 302.020.840.000
Anggaran Belanja Barang	: 287.879.559.000
Anggaran Belanja Modal	: 129.849.545.000
Jumlah	: 719.749.944.000

TOTAL KESELURUHAN

Anggaran Belanja Pegawai	: 315.770.403.000
Anggaran Belanja Barang	: 317.520.638.000
Anggaran Belanja Modal	: 130.130.975.000
Jumlah	: 763.442.016.000

PENGAWASAN

Upaya dalam rangka mengurangi Overkapasitas

Kondisi aktual di Lapas Rutan se-Jawa Tengah telah terjadi over kapasitas, meskipun tidak terlalu signifikan. Pada tanggal 4 Desember 2023, terdapat 14.486 orang Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas/ Rutan/ LPKA di Jawa Tengah, yang terdiri dari 11.490 narapidana dan 2.822 tahanan. Kapasitas hunian yang ada pada 46 Lapas/ Rutan/ LPKA adalah sejumlah 9.512 orang, sehingga terjadi overkapasitas sebesar 50 %.

Mapping/ Pemetaan Kapasitas Hunian Lapas/ Rutan/ LPKA

Pemetaan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Lapas/Rutan/LPKA yang overkapasitas dan yang tidak, sehingga dapat dilakukan upaya penanganan selanjutnya.

Redistribusi Narapidana

Redistribusi adalah pemindahan narapidana dari lapas yang overkapasitas ke lapas lain yang tidak overkapasitas/ masih memungkinkan untuk ditambahkan WBP. Sepanjang Tahun 2023, telah dilaksanakan pemindahan/redistribusi penghuni lapas/rutan/LPKA sebanyak 2.631 orang (redistribusi dalam wilayah Jawa Tengah). Redistribusi Narapidana ini dilakukan sesuai dengan edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah nomor W13.PK.01.01.02-811 bulan Mei 2017 tentang Pemindahan Narapidana untuk Mengurangi Overkapasitas.

Narapidana yang memenuhi persyaratan sesuai edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor: PAS-PK.01.01.02-100 tanggal 13 Mei 2013 diajukan persetujuan Kepala Kantor Wilayah untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Optimalisasi Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bebas (CB), Pemberian Remisi dan Asimilasi Rumah dalam masa Pandemi Covid19.

Optimalisasi pemberian remisi, PH, CMB dan CB dilakukan secara online melalui aplikasi sisten database oemasyarakatan. Pengusulan remisi secara online ini dapat mempercepat, mempermudah pemantauan, penghematan biaya, mengurangi penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan transparansi, dan adanya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan yang dapat mengganggu proses pembinaan.

Strategi Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan Paspor

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek dalam fungsi keimigrasian. Fungsi keimigrasian yang dimaksud merupakan suatu bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai macam pelayanan keimigrasian yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, salah satunya yaitu dalam bentuk pemberian pelayanan paspor bagi Warga Negara Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian khususnya dalam pelayanan paspor demi memberikan kualitas pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Upaya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan paspor telah dilakukan melalui upaya penambahan *Hardware* maupun *Software* pada *server* Direktorat Jenderal Imigrasi. Semua ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk melayani masyarakat dan mempermudah mencari informasi maupun mengurus permohonan paspor pada kantor maupun unit pelaksana teknis

keimigrasian. Pelayanan publik merupakan salah satu aspek dalam fungsi keimigrasian. Fungsi keimigrasian yang dimaksud merupakan suatu bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai macam pelayanan keimigrasian yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, salah satunya yaitu dalam bentuk pemberian pelayanan paspor bagi Warga Negara Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian khususnya dalam pelayanan paspor demi memberikan kualitas pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Upaya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan paspor telah dilakukan melalui upaya penambahan *Hardware* maupun *Software* pada *server* Direktorat Jenderal Imigrasi. Semua ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk melayani masyarakat dan mempermudah mencari informasi maupun mengurus permohonan paspor pada kantor maupun unit pelaksana teknis keimigrasian.

PENJELASAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

ANGGARAN

Realisasi dan Perencanaan Anggaran

Total Anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 4.229.549.464.000

Realisasi sebesar Rp. 3 976.115.329.987 (94,01%)

Total Anggaran tahun 2023⁴ sebesar Rp. 4.361.440.427.000 (naik 3 %)

Target PNPB tahun 2023 : Rp. 1.306.245.772.000

Realisasi : Rp. 1.092.434.445.082

Prosentase : 83,63 %

Target PNPB tahun 2024 : 1.413.274.974.000

PENGAWAS

Trend Gangguan Kamtibmas

Kejahatan Crime mengalam peningkatan sebesar 24%, dimana tahun 2022 sebanyak 7239 kasus, tahun 2023 sebanyak 9525 kasus (peningkatan 2.286 kasus).

Kejahatan criminal tindak pidana ringan mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebanyak 90%, dimana tahun 2022 sebanyak 224 kasus, tahun 2023 sebanyak 2340 kasus (peningkatan 2.116 kasus)

Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban juga mengalami peningkatan sebesar 48%, dimana tahun 2022 sebanyak 2136 kasus, tahun 2023 sebanyak 4163 kasus (peningkatan 2.027 kasus)

Kasus menonjol di wilayah Polda Jawa Tengah

Polda Jateng mengungkap kasus tindak pidana korupsi ditreskrimsus Polda Jateng (EW) selaku Dirut Dana Pensiun perusahaan Pelabuhan dan pengerukan (DP4) yang merupakan anak perusahaan PT Pelindo bersama dengan (US) selaku manajer investasi DP4 telah melakukan kerjasama dengan tersangka (JA) dalam pembelian tanah berlokasi di Salatiga seluas 37.476 M2 yang bertentangan dengan arahan investasi Kemenkeu serta SOP investasi DP4. Akibat perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4.970.641.000,00.

Data penganan kasus tindak pidana korupsi tahun 2022 dan tahun 2023

Tahun 2022

Target : 117 kasus
Selesai : 50 kasus
Jumlah tersangka : 51 tersangka

Tahun 2023

Target : 66 kasus
Selesai : 15 kasus
Jumlah tersangka : 15 tersangka

Jumlah target, penyelesaian perkara dan jumlah tersangka di tahun 2023 mengalami penurunan disbanding tahun 2022.

Namun secara kualitatif, asset recovery keuangan negara di tahun 2023 Rp. 49.556.628.486,- lebih banyak disbanding tahun 2022 sebesar Rp. 13.619.757.729,-

Tindak Pidana Narkoba

Tahun 2022

Jumlah kasus : 1866
Jumlah tersangka : 1340

Tahun 2023

Jumlah kasus : 1948
Jumlah tersangka : 2499

Narkotika : 1.537 kasus
Psikotropika : 197 kasus
Obat : 332 kasus

Polda Jateng selama periode 2023 telah menyelamatkan sebanyak 100.000 jiwa

Dalam periode tahun 2023 total tahanan Polda Jateng sebanyak 1.499 tahanan dan sebanyak 1.129 tahanan/75% merupakan tahanan narkoba.

Upaya preemtif dan preventif Polda Jateng dalam memitigasi penyalahgunaan narkoba

- Dalam 1 tahun Polda Jateng telah melakukan rehabilitasi kepada 54 tersangka dari 38 kasus tindak pidana narkoba
- Polda Jateng telah membangun sebanyak 827 kampung Tangguh untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu P4GN

- Polda Jateng telah melaksanakan 1.626 kegiatan pembinaan dan penyuluhan dan kampanye/himbauan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan prekursor narkoba.
- Polda Jateng telah melakukan sosialisasi P4GN melalui media cetak, leaflet, booklet, poster, dan sosmed tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba serta kontak person petugas layanan anti narkoba (Polri/BNN) dan IPWL
- Melaksanakan kegiatan prss release dan sosialisasi terkait keberhasilan pelaksanaan operasi (dilaksanakan setelah kegiatan operasi selesai)
- Bersinergi dan berkolaborasi dengan instansi terkait dan elemen masyarakat dalam program P4GN.

Faktor yang mempengaruhi Kamtibmas di wilayah Jawa Tengah

Ideologi

Ideologi kelompok radikal dan teroris yang berkembang menyebar di elemen masyarakat.

Politik

1. Dinamika politik menjelang Pemilu 2024
2. Rangkaian kegiatan partai politik
3. Beakhirnya masa jabatan Kepala Daerah TMT September 2023

Ekonomi

1. Konflik pada proyek strategis nasional
2. Potensi kerawanan banjir di Jateng
3. Inflasi di Jateng tahun 2023 sebesar 3,16% sedangkan inflasi Nasional tahun 2023 sebesar 2,86%

Sosial Budaya

1. Aksi unjuk rasa oleh elemen masyarakat dan mahasiswa yang berpotensi terjadi tindak pidana
2. Pengaruh budaya asing masuk ke wilayah Jateng

Keamanan

1. Maraknya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masyarakat karena factor ekonomi
2. Para pelaku terorisme di Jateng

Program Unggulan Polda Jateng

Dengan mengedepankan kehadiran Polri di masyarakat dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman serta menjadi problem solver dan dinimisator permasalahan social di masyarakat.

Program pendukung

Aplikasi system informasi, tanggap, kolaborasi dan responsive sebagai program aduan masyarakat terkait Kamtibmas di wilayah hukum Polda Jateng.

Go Sigap (siap, integritas, tanggap) sebagai program modernisasi yang terintegrasi guna mengurangi pungli pada bidang pelayanan Polantas Polda Jateng

Mageri Segoro sebagai program pendukung dalam penanganan banjir rob dan abrasi laut.

Libas sebagai layanan yang memudahkan masyarakat dalam melaporkan segala aduan terkait ganggaun kamtibmas dan mendapatkan penghargaan TOP 45 kompetisi inovasi pelayanan publik.

Operasi Mantap Brata

Dimulai pada tanggal 19 Oktober 2023 s.d. 20 Oktober 2024. Tahapan pemilu saat ini sudah masuk di masa kampanye dimulai dari tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024 dimana Polda Jateng bersinergi dengan stakeholder dalam rangka merawat kebangsaan dan merawat demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan untuk mencegah polarisasi.

Indikator kerawanan di Jawa Tengah

Sangat rawan 37 TPS

1. Lokasi TPS beredar isu sara, hoax, dan terdapat spanduk provokasi
2. Masyarakat mudah terprovokasi
3. Terdapat kelompok garis keras dan basis kelompok radikal
4. Lokasi tempat tinggal Capres / Cawapres
5. Sedang terjadi konflik

Rawan 545 TPS

1. TPS berada di tempat pemukiman padat heterogeny dan masyarakat antusias mengikuti proses Pemilu
2. Masyarakat memiliki fanatisme agama sangat tinggi dan adanya dominasi ketokohan terhdap seseorang yang sangat dominan
3. TPS berada di lokasi kejahatan tinggi
4. Lokasi TPS terdapat permasalahan dengban kondisi geografis (banjir, rob, tanah longsor dll)
5. Daerah sulit terjangkau
6. Wilayah sangat luas dan jarak antar TPS jauh
7. Pernah terjadi sejarah konflik

Kurang rawan 116.717 TPS

1. Jarak TPS berdekatan / mudah dijangkau dan tidak ada potensi / sejarah konflik
2. TPS berada di wilayah dengan masyarakat sadar hukum
3. Masyarakat mendukung sepenuhnya dengan penyelenggara pemilu

Sikap Netral Anggota Polri pada Tahapan Pemilu 2024

- Dilarang membantu mendeklarasikan dukungan
- Dilarang memberi / meminta atau distribusi dalam bentuk apapun
- Dilarang menggunakan atau memasang atribut pemilu

- Dilarang menghadiri atau narasumber kecuali pengamanan yang berdasarkan Sprin Gas
- Dilarang menanggapi dan menyebarkan gambar/foto parpol, bakal caleg, capres dan cawapres
- Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal caleg, capres dan cawapres
- Dilarang foto self picture di medsos yang berkaitan dengan bakal caleg, capres dan cawapres
- Dilarang memberikan dukungan politik dan mejadi penitia pemilu
- Tidak menggunakan fasilitas dinas/mengikutsertakan/mengatasnamakan institusi Polri/bhayangkari
- Tingkatkan fungsi pengawas internal

Kasus menon

PENJELASAN GUBERNUR AKPOL SEMARANG ANGGARAN

DIPA TA 2023

PAGU Awal

Belanja Pegawai	: 67.268.501.000
Nelanja Barang	: 133.190.940.000
Belanja Modal	: 6.000.000.000
Jumlah	: 206.459.441.000

Revisi PAGU Awal Ke-I

Belanja Pegawai	: 67.268.501.000
Belanja Barang	: 134.641.640.000
Belanja Modal	: 6.000.000.000
Jumlah	: 207.910.141.000

Revisi PAGU Revisi Ke-II

Belanja Pegawai	: 67.268.501.000
Belanja Barang	: 139.674.540.000
Belanja Modal	: 6.000.000.000
Jumlah	: 212.943.041.000

1. Revisi ke-I terdapat pada alokasi belanja barang karena ada penambahan kuota didik siswa SIPSS T.A. 2023 yang semula 100 siswa (6 bulan) menjadi 157 siswa (4,5 bulan) dengan pendidikan dibagi menjadi 2 gelombang.
2. Revisi ke-II karena ada penambahan jumlah peserta didik angkatan 58 yang semula kuota didik 175 menjadi 302 taruna.

Realisasi DIPA s.d. November 2023

Per Jenis Belanja

PAGU	: 212.943.041.000
------	-------------------

REALISASI : 196.053.921.379
SISA : 16.889.119.621

Per Program
PAGU : 212.943.041.000
REALISASI : 196.053.921.379
SISA : 16.889.119.621

Pengawasan

Dari tahun 2021 s.d. sekarang, data pelanggaran disiplin berat taruna sejumlah 152 KASUS

Jenis pelanggaran :

Sipil dan bolos tanpa izin	: 98 kasus
Rokok dan miras	: 9 kasus
Hate Speech	: 5 kasus
Kekerasan	: 28 kasus
LGBT	: 2 kasus
Pornografi	: 1 kasus
Mencontek	: 2 kasus
Judi	: 3 kasus
Pencurian	: 1 kasus
Asusila, pacarana sesama peserta didik	: 3 kasus

Sanksi

4. Turun tingkat dan pangkat selama waktu tertentu 112 kasus
5. Turun tingkat dan pangkat 31 kasus
6. Tinggal tingkat dan pangkat 5 kasus

Inovasi Gubernur Akpol pendekatan humanis kepada taruna Gen-Z

Hal ini akan memberikan dampak positif antara lain:

- Bagi jajaran pengasuh di bawahnya untuk tidak segan bersikap lebih humanis kepada taruna dan menanggalkan kesan kaku, dimana hal tersebut telah dicontohkan oleh Gubernur Akpol dan Ibu Asuh Taruna Akpol
- Bagi Taruna akan merasa lebih dekat dengan pimpinan, menganggapnya sebagai orang tua atau mentor sendiri sehingga pada akhirnya mereka akan lebih nyaman untuk mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian.

PENJELASAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

ANGGARAN

Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan jumlah 38 satuan kerja mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 437.792.423.000,- (*empat ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) sedangkan **realisasi** sampai per tanggal 06 Desember 2023 sebesar Rp. 400.367.972.336,- (*empat ratus milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan*

ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 91.45% dari alokasi anggaran tersebut.

Program Prioritas Nasional Tahun 2023

Dalam Rencana Kerja (Renja) K/L Kejaksaan RI, terdapat dua kegiatan di tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang masuk dalam Rincian Output Prioritas Nasional sebagai perwujudan atas Prioritas Nasional Pemerintah RI Nomor 7: memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, Program Prioritas: Penegakan Hukum Nasional, Kegiatan Prioritas: Peningkatan Akses Terhadap Keadilan, Proyek Prioritas: Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat.

Realisasi PNPB tahun 2023
Adapun terkait dengan Realisasi PNPB, tahun 2023 Seluruh Satker di Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah berhasil memperoleh PNPB sebesar **Rp.45.854.348.946,-** atau **248,41 %** dari target sebesar **Rp. 18.459.020.000,-**

Pagu anggaran tahun 2024.
Pada tahun anggaran 2024 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan jumlah 38 satuan kerja mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 474.328.332.000,-

PENGAWASAN

A. BIDANG PIDANA KHUSUS

Bahwa data Penanganan perkara Tindak Pidana Khusus yang menjadi Perhatian Masyarakat, terutama yang terkait dengan upaya optimalisasi pendapatan Negara dan Kesejahteraan Rakyat dapat kami jelaskan sebagai berikut :

7. Perkara Bank Mandiri
8. Perkara Bank BRI Agro
9. Perkara Bank BJB

Bahwa terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Fasilitas kredit oleh Beberapa Bank tersebut diatas, penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga menindaklanjutinya dengan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : Print-693/M.3/Fd.2/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Proses Pemberian Fasilitas Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk) Kantor Cabang Semarang kepada PT Seruni Prima Perkasa pada tahun 2017.
2. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: PRINT-694/M.3/Fd.2/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang

Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang pada proses Fasilitas Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT. Citra Guna Perkasa pada Tahun 2016.

3. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor PRINT- 695/M.3/Fd.2/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Proses Pemberian Fasilitas Kredit PT Bank Mandiri Kantor Cabang Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa dan PT Harsam Indovisitama Tahun 2016 s/d 2017.

Bahwa penyidik saat ini sudah mendapatkan LHA PPATK terkait perkara dimaksud dan telah menindaklanjuti dengan mencari kecukupan alat bukti sebelum menentukan tersangka

Sinergitas dan Kolaborasi melalui pemahaman bersama dalam Forum Sentra Gakkumdu.

Bahwa untuk kesiapan dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa :

- Telah ditunjuk 219 (dua ratus sembilan belas) Jaksa yang masuk dalam Sentra Gakkumdu.]
- Telah dilaksanakan Piket Jaksa setiap hari di Sekertariat Sentra Gakkumdu Provinsi maupun Kota/Kabupaten.
- Telah dilaksanakan Rapat Kordinasi untuk persaamaan persepsi antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan setiap bulan minggu pertama di Setra Gakkumdu baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten
- Telah mengikuti Rapat Kordinasi Nasional Sentra Gakkumdu sebanyak 2 (dua) kali yaitu: 1. Januari 2023 di Surabaya diikuti oleh Asisiten Tindak Pidana Umum dan Kasi Kamnegtibum TPUL. 2. November 2023 di Jakarta dikuti oleh Asisiten Tindak Pidana Umum Kejati Jateng dan Kasi Pidum seluruh Kejari Jateng.
- Kasi Kamnegtibum TPUL telah mengikuti diklat Penanganan Perkara Tindak Pemilu Gabungan jaksa, Hakim, Polisi dan bawaslu di Badan diklat Kejaksaan RI pada bulan November 2023.
- Menjadi Narasumber sebanyak 3 (tiga) kali dibulan, juli, oktober dan november 2023 dalam FGD Simulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu yang diadakan oleh Polda Jateng.
- Menjadi Narasumber sebanyak 1 (satu) kali dibulan Oktober 2023 dalam pengadaan barang dan jasa logistik pemilu yang diadakan oleh KPU Prov Jateng
- Perkara Pemilu yang masuk per 1 Desember 2023 di Wilkum Kejati Jateng NIHIL.

PENJELASAN JAJARAN PERADILAN JAWA TENGAH

A)PENJELASAN KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG

ANGGARAN

Alokasi Anggaran Tahun 2023

Pengadilan Tinggi Semarang beserta Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang telah mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI terdiri dari 3 (tiga) program kerja antara lain sebagai berikut:

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. (1049. DIPA Badilum) yang tertuang dalam DIPA 03.
- Program Dukungan Manajemen dan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. (1066. DIPA BUA) tertuang kedalam DIPA 01.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Perkantoran. (1071. DIPA BUA) tertuang kedalam DIPA 01.

Realisasi Anggaran Tahun 2023

DIPA 01

Nilai Pagu : 42.374.004.000

Realisasi : 40.852.105.856

DIPA 03

Nilai Pagu : 497.000.000

Realisasi : 487.479.110

Program Prioritas

Dari Program Kerja yang telah ditetapkan oleh eselon 1 Mahkamah Agung RI terdapat program – program prioritas baik yang ada di Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding) dan Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama). Adapun program prioritas di Pengadilan Tinggi meliputi terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang.

Sedangkan untuk Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) antara lain : Pembebasan Biaya Perkara

Program prioritas Pembebasan biaya perkara adalah Layanan hukum berupa pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 yaitu Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma- cuma,

Pagu Anggaran 2024

DIPA 01 : Rp. 281.356.927.000

DIPA 03 : Rp. 5.241.474.500

Rencana Strategis dan Program Prioritas

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Semarang tahun 2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah serta dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Tinggi Semarang Yang Agung, maka Pengadilan Tinggi Semarang menetapkan rencana strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum

PENGAWASAN

Diversi, Restorative Justice dan Mediasi
Rekapitulasi mengenai Diversi, *Restorative Justice* dan Mediasi diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang sampai bulan November 2023 :

- - Diversi : 6 Perkara
- - *Restorative Justice* : 50 Perkara
- - Mediasi : 88 Perkara

Berdasarkan rekapitulasi data perkara tahun 2022 dan 2023 diatas dengan penjelasan sebagai berikut :

- Perkara Pidana Banding yang menonjol di Pengadilan Tinggi Semarang tahun 2022 adalah perkara Narkotika sejumlah 428 perkara, disusul perkara Lingkungan Hidup sejumlah 2 perkara, kemudian Perlindungan Anak sejumlah 41 perkara dan Pidana Khusus Anak sejumlah 14 perkara, dan Tindak Pidana Lainnya sebanyak 185 perkara.
- Perkara Pidana Banding yang menonjol di Pengadilan Tinggi Semarang sampai dengan bulan November tahun 2023 adalah perkara Narkotika sejumlah 532 perkara, perkara Lingkungan Hidup sejumlah 9 perkara, kemudian Perlindungan Anak sejumlah 25 perkara dan Pidana Khusus Anak sejumlah 20 perkara, perkara TPPO sejumlah 6 perkara, dan Tindak Pidana Lainnya sebanyak 208 perkara.
- Perkara Perdata banding yang menonjol di Pengadilan Tinggi Semarang
- Sampai dengan bulan November tahun 2023 adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum sejumlah 298 perkara, yang selanjutnya terdapat perkara Wanprestasi sejumlah 83 perkara.

Perkara yang Menonjol

Perkara yang menonjol di Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang antara lain sebagai berikut :

1. Nomor Perkara 271/Pid.Sus/2023/PT SMG Jo Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Skt atas nama Terdakwa SUGI NUR RAHARJA
2. Nomor Perkara 272/Pid.Sus/2023/PT SMG Jo Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Skt atas nama Terdakwa BAMBANG TRI MULYONO.

3. Perkara Pidana Nomor 180/Pid.Sus/2022/PT SMG Jo Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pti atas nama terdakwa SUPARNO Bin Alm MUSLIH, Dkk. Ada 15 (limabelas) Terdakwa.

Perkara Eksekusi Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan Identifikasi Permasalahan

- Jumlah Perkara Eksekusi Sudah BHT. Eksekusi masuk di Tahun 2023 se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang terdaftar 213 Perkara sedangkan sisa yang belum dilakukan eksekusi 149 Perkara.
- Identifikasi permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi

Hambatan

- Perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) belum dilaksanakan eksekusinya dikarenakan sebagian besar mengenai hak tanggungan. Dikarenakan kreditur menuntut haknya mengenai jumlah denda dan bunga. Sehingga debitur mengalami kesulitan untuk membayar.
- Perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) belum dilaksanakan eksekusi dikarenakan keamanan dan juga masih terdapat gugatan perlawanan pihak ke 3 (tiga). Sehingga menjadi kendala Pengadilan Negeri tidak bisa menjalankan eksekusi.

Saran

Agar Mahkamah Agung membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur mengenai hak tanggungan.

B)PENJELASAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

ANGGARAN

Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA tahun 2023

Pagu DIPA 01 Pengadilan Agama se-Jawa Tengah sebesar Rp. 279.392.613,- terdiri atas DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 276.381.298 dan DIPA 04 Badan Peradilan Agama Rp. 3.011.315.000.

Pagu Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 271.606.931.000 terdiri dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 268.290.578.000 dan DIPA 04 Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 3.316.353.000

PENGAWASAN

Bulan Januari s.d. November 2023, Pengadilan Tinggi Agama Semarang sampai dengan bulan November 2023 perkara yang di terima sebanyak 358 perkara.

Sisa perkara tahun 2019 s.d. 2022 menyisakan 0 perkara

Perkara yang diputus 340

Dari bulan Januari s.d. November 2023, Pengadilan Tinggi Agama Semarang penerimaan perkara dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2023 sudah memutus perkara sebanyak 340 perkara.

Percara E-Court

Dari bulan Januari s.d. November 2023 Pengadilan Tinggi Agama Semarang menerima perkara dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2023 sudah menerima perkara e-court sebanyak 93 Perkara yang manual sebanyak 365 perkara.

Sisa perkara Tahun lalu 4556 Perkara.

Perkara yang diterima tahun 2023 86714 perkara

Total perkara Kabul 65641 perkara

Perkara dicabut 150 perkara

Perkara ditolak 822 perkara

Perkara tidak diterima 438 perkara

Perkara digugurkan 438 perkara

Perkara dicoret dari register 92 perkara

Perkara Eksekusi

Perkara eksekusi yang diterima oleh Pengadilan Agama diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 32 perkara dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2023.

Perkara eksekusi yang belum konfirmasi di Pengadilan Agama diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 4 perkara dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2023

Pelaksanaan Perkara eksekusi yang belum selesai di Pengadilan Agama diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 18 perkara dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2023.

Perkara eksekusi dicabut dari Pengadilan Agama diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 3 perkara.

Pelaksanaan perkara eksekusi yang sudah selesai di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang sebanyak 4 perkara dari bulan Januari s.d. November 2023

Perkara eksekusi damai di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 3 perkara dari bulan Januari s.d. November 2023

Hambatan dalam Proses Eksekusi

Sumber Daya Manusia. Hambatan pelaksanaan dari sisi sumber daya manusia adalah kurang siapnya Sumber Daya Manusia yang menguasai masalah Eksekusi di Pengadilan Tingkat Pertama. Tidak adanya Penaksir Internal yang kredibel untuk Nilai obyek di bawah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) Contohnya Sumber Daya Manusia kurangnya Jurusita untuk mendukung penyelesaian perkara eksekusi kecuali Panitera merangkap/bertindak sebagai Jurusita.

Putusan

Amar dalam petitum tidak ada amar condemnatur; Amar dalam petitum tidak sampai menyebutkan berapa jumlah bagian yang di dapat ahli waris; Dalam diktum amar putusan terhadap obyek sengketa tidak menyebutkan luas obyek dan nama pemilik dalam sertifikat SHM sehingga menyulitkan pelaksana eksekusi di lapangan; Dalam putusan ada amar "membagi" tidak diikuti dengan "meghukum" sehingga tidak bisa di eksekusi .Gugatan hak (waris) yang obyeknya dikuasai ahli waris lainnya dan telah terbit SHM. Amar putusan menetapkan obyek sengketa sebagai harta waris yang belum diagi, namun tidak dikuti dengan "menyatakan SHM tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" Saat mau dieksekusi, terkendala oleh hak kepemilikan (SHM);

Kendala Teknis Lainnya

Ketika eksekusi diajukan/dimohonkan, pihak Termohon eksekusi tidak diketahui lagi alamatnya; Debitur yang telah nyata wanprestasi, kemudian Kreditur (Bank) meminta Pengadilan Agama untuk melaksanakan eksekusi lelang melalui KPKNL kesulitan untuk melelang karena ketika dilaksanakan pelelangan ternyata tidak ada peminat lelang;

Termohon Eksekusi enggan menghadiri anaming; Terkait dengan beban-beban putusan Termohon Eksekusi tidak punya harta yg bisa dilaksanakan eksekusi; Salah satu agunan diagunkan ke bank lain oleh Pihak Tergugat;

Penawaran Lelang tidak ada sehingga eksekusi tidak selesai; Adanya pemekaran wilayah menyebabkan perbedaan letak objek perkara antara letak di SHM dan letak dalam gugatan dan putusan sehingga menyebabkan perbedaan data yang bisa menjadi dibatalkannya lelang eksekusi; Benturan dengan pihak yang tidak ada kaitannya dengan pihak seperti Preman dan LSM.

C)PENJELASAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG ANGGARAN

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN 2023

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mendapat Pagu Anggaran Tahun 2023 Sebagai berikut : SP-DIPA-005.01.2.531830/2023, Tanggal 30 November 2022 Sebesar : Rp. 8.607.660.000,-

Dengan Rincian Program dan Kegiatan sbb :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

❖ Dengan Anggaran sebesar : Rp. 9.620.570.000,-

❖ Capain Realisasi Anggaran 105.35% sebesar : Rp. 10.206.972.542,- Realisasi melebihi pagu anggaran sehingga terdapat Pagu minus sebesar : Rp. -564.438.542 pada akun Gaji dan Tunjangan karena ada penambahan pegawai (Hakim masuk) sedang dimintakan tambahan anggaran di Mahkamah Agung RI serta dilakukan revisi Anggaran.

2. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA

❖ Dengan Anggaran sebesar : Rp. 68.200.000,-

❖ Capain Realisasi Anggaran 99,99 % sebesar : Rp. 68.192.075,-

SP-DIPA-005.01.2.531831/2023, Tanggal 30 November 2022

Sebesar : Rp. 43.626.000,-

Dengan Rincian Program dan Kegiatan sbb:

❖ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Anggaran sebesar : Rp. 43.626.000,-

❖ Dengan Realisasi Anggaran 81,01% sebesar : Rp. 35.340.000,- Realisasi belum terserap sempurna karena ada Anggaran untuk Layanan Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) tidak ada realisasi karena sampai saat ini belum ada Pihak Pencari Keadilan yang menggunakan fasilitas Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) tersebut.

KEBUTUHAN ANGGARAN YANG MASIH DIPERLUKAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSINYA
Kebutuhan yang masih diperlukan di PTUN Semarang diantaranya :
Di bidang Sarana Prasarana:

1. Kebutuhan Anggaran Renovasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas.
Saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memiliki 11 Rumah Dinas,

rata-rata keadaan rumah dinas tersebut dalam kondisi rusak ringan sampai rusak berat. Ada 2 Rumah Dinas mengalami kerusakan berat bahkan diantaranya ada yang atapnya roboh, sehingga di non- operasionalkan, hal tersebut membuat rumah dinas tersebut sudah tidak layak untuk ditinggali dan membahayakan penghuni rumah dinas tersebut. Dengan melihat kondisi di atas, pada tahun anggaran 2024 menjadi skala prioritas utama untuk Pembangunan atau Renovasi Gedung dan Bangunan berupa Belanja Rehabilitasi Rumah Dinas untuk itu diperlukan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2. Kebutuhan Anggaran Gedung Arsip Vital (Aktif dan Inaktif)

Belum adanya gedung arsip yang berfungsi sebagai penyimpan dokumen perkara dan dokumen penting lainnya. Saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum mempunyai Ruang/Gedung Arsip yang memadai, ruang arsip ada belum bisa mengcover seluruh kebutuhan pengarsipan dokumen-dokumen yang lama. Diantaranya kebutuhan akan Ruang Arsip Hukum, Ruang Arsip Perkara, Ruang Arsip Keuangan, Ruang Arsip Kepegawaian, Ruang Arsip Umum dan Keuangan dsb. Sehingga banyak arsip dokumen yang tercecer dan tidak berada di tempat seharusnya. Maka sangat dibutuhkannya

Pembangunan/Renovasi Gedung Dan Bangunan Penambahan Gedung Kantor PTUN Semarang (Ruang Arsip Kepaniteraan Dan Ruang Arsip Kesekretariatan) yang memadai, ruang arsip tersebut akan dibagi dua lantai yaitu lantai atas ruang arsip kesekretariatan, dan lantai bawah ruang kepaniteraan.

Kebutuhan Anggaran Alat Pengolah Data dan Komunikasi
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dibutuhkan infrastruktur teknologi informasi berupa Alat Pengolah Data dan Komunikasi berupa desktop Computer, Handy Cam, Proyektor *Infocus*, Printer Colour, Harddisk eksternal kapasitas 4 TERABYTE, Switch Hub 24 PORT, Lan Tester, Access Point, Router, Web Cam untuk Zoom, Sound Bar untuk Zoom, Laptop untuk Kegiatan Editing Video, Alat Perekam Suara Digital untuk Ruang Sidang, Scanner HVS, MIC WIRELESS, MIC CLIP ON, Handy Talky, Televisi SMART TV. Saat ini di bagian Kesekretariatan maupun Kepaniteraan banyak terdapat aplikasi Sistem Informasi seperti SAKTI, SIMAN, E-SADEWA, E-BIMA, E-IPLANT, SAS, GPP, SIKEP, SIPP, E- COURT dan sebagainya yang membutuhkan alat pengolah data dan komunikasi yang memadai. Kebutuhan alat pengolah data dan komunikasi sangat penting dalam mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas sehari-hari aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terutama di bagian kesekretariatan. Hampir tidak ada pekerjaan yang tidak menggunakan komputer, tetapi dalam pelaksanaannya sering terjadi hambatan dalam penggunaan komputer dan teknologi informasi yang penyebabnya antara lain: kerusakan hardware, software dan kondisi alat pengolah data dan komunikasi yang sudah rusak/usang. Oleh karena itu perlu diadakan kegiatan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi yang baru untuk menggantikan peralatan lama yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi serta untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi yang terus meningkat dan berkembang pesat.

Kebutuhan Anggaran Pembangunan Gedung Aula Serbaguna. Kantor PTUN Semarang belum memiliki Gedung Aula Serbaguna, sehingga jika ada acara pelantikan jabatan atau acara kedinasan lain yang dihadiri oleh banyak peserta dan memerlukan ruang dengan kapasitas yang luas maka masih menggunakan Ruang Sidang Utama.

Kebutuhan Anggaran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran. Prioritas kebutuhan satker saat ini diantaranya adalah kebutuhan akan peralatan dan fasilitas perkantoran, yang mana yang paling dibutuhkan saat ini yaitu berupa Air Conditioner (AC), Kursi Tunggu Sofa 1 Sheet, Kursi Tunggu Sofa 2 Sheet untuk Ruang Tunggu Pengunjung, Meja Kerja Pimpinan, Almari Arsip untuk Arsip Aktif dan Inaktif, Pengadaan BOX TELEPON, Pengadaan PABX 8 line 24 ext dalam rangka untuk dapat memudahkan dan menunjang semua petugas pengadilan dalam menjalankan tupoksinya dan memaksimalkan kinerja pelayanan baik kepada masyarakat pencari keadilan maupun kepada aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

PAGU ANGGARAN 2024

1. Program Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

❖ Dengan Anggaran sebesar : Rp. 10.475.013.000,-

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

❖ Dengan Anggaran sebesar : Rp. 49.910.000,-

PENGAWASAN

Berdasarkan data di Kepaniteraan Muda Perkara:

• Perkara yang masuk Tahun 2023 adalah 91 Perkara terdiri dari :

- - Pertanahan
- - Perijinan
- - T ender
- - Lelang
- - Lingkungan Hidup
- - Kepegawaian
- - Lain lain
- - Fiktif Positif
- - KIP/Keterbukaan Informasi Publik
- - Ketenagakerjaan

- - Perangkat Desa
- - PAW/Pergantian Antar Waktu

Identifikasi permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi 1. Permasalahan Dan Hambatan

Sebagaimana telah diketahui bersama, secara umum faktor yang menjadikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dipatuhi menurut Dr. Supandi, SH., MH, dalam desertasinya adalah masih lemahnya Sistem Eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Th. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang lebih menyandarkan pada kesadaran Pejabat Tata Usaha Negara yang disebabkan beberapa faktor :

- Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat;
- Adanya kepentingan pejabat;
- Adanya kekeliruan visi dalam penggunaan wewenang jabatannya

dimana pejabat bertindak atau tidak bertindak bukan untuk kepentingan publik, melainkan bertindak seolah-olah institusi publik itu dianggap milik pribadinya. Sejalan dengan itu Dr. Yos Johan Utama, SH., MH, menyatakan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara lebih menekankan pada moral responsibility (pertanggungjawaban moral) dan bukan kepada yudicial responsibility. Pernyataan ini didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diletakkan pada sistem yang berujung atau didukung oleh suatu penetrasi sebagaimana layaknya pada Peradilan Perdata maupun Pidana. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diletakkan pada Law Awareness (kesadaran hukum) dari Pejabat Tata Usaha Negara.

Program peningkatan integritas dan kapasitas di wilayah peradilan : Pelaksanaan A. program peningkatan integritas dan kapasitas di wilayah peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang saya pimpin, salah satunya mengenai keterbukaan informasi, dimana dalam Pasal 28 F Undang – Undang Dasar setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan definisi Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas hakim.

Langkah – langkah yang telah dilakukan dan akan dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme Hakim antara lain : Mengikuti

Pelatihan – Pelatihan Yang Diadakan Oleh Balitbangkumdil; Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti pelatihan Sertifikasi untuk Hakim; Melakukan Pengajaran di beberapa Universitas di Semarang antara lain Universitas Sultan Agung, Universitas Soegiapranoto, Universitas Negeri Semarang dan Universitas Muhammadiyah Magelang, dimana dalam pengajaran tersebut Hakim dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan kuliah mengenai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Praktik Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara; Diskusi Ilmiah para Hakim, dimana dalam diskusi tersebut dibahas mengenai perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

D)PENJELASAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG ANGGARAN

Realisasi Anggaran T.A. 2023

Pengadilan Militer II-10 Semarang mendapat anggaran dari Badan Urusan Administrasi MA RI (663288) sebesar Rp. 5.113.252.000,- (lima milyar seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) terealisasi sampai dengan 5 Desember 2023 sebesar Rp. 3.523.467.161,- (tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh satu rupiah) dengan sisa anggaran Rp. 1.589.784.839,- (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan sudah terserap 68,91%. Rendahnya pencapaian dikarenakan terdapat kelebihan pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 1,3 Milyar yang rencananya akan dialokasikan ke satker lain yang mengalami pagu minus belanja pegawai oleh BUA MA RI.

Selain anggaran dari BUA Pengadilan Militer II-10 Semarang juga mendapatkan anggaran dari Dirjen Badilmiltun MA RI (663289) sebesar Rp. 88.685.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Terealisasi per 5 Desember 2023 sebesar Rp. 69.079.300,- (enam puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). 77,89%.

Pagu Anggaran T.A. 2024

Untuk Pagu Anggaran BUA MA RI tahun 2024 untuk belanja pegawai dan belanja barang sebesar Rp. 3.824.300.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). Untuk Pagu Anggaran Dirjen Badilmiltun MA RI tahun 2024 sebesar Rp. 83.332.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Rencana strategis dan akan menjadi skala prioritas

Program unggulan prioritas 2024 yaitu Rencana Pembangunan rumah dinas Kepala dan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang dan pagar pengamanan aset.

PENGAWASAN

Data keadaan perkara pada tahun 2023 s.d saat ini tanggal 12 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Perkara Kejahatan.

1. Sisa Perkara Tahun 2022 : 19 Perkara
2. Perkara Masuk Tahun 2023 : 56 Perkara
3. Perkara diputus Tahun 2023 : 65 Perkara
4. Perkara dilimpahkan Tahun 2023 : 0 Perkara
5. Sisa Perkara Tahun 2023 : 10 Perkara

Dengan rincian bahwa jumlah perkara paling banyak di dominasi oleh perkara Desersi sebanyak **29 (dua puluh sembilan)** Perkara yang telah diselesaikan di tahun ini. Secara kuantitatif perkara menonjol atau yang paling banyak di setiap tahunnya adalah perkara Desersi. Latar belakang penyebab Tindak Pidana Desersi mayoritas dikarenakan mengenai masalah ekonomi, dimana untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari masih dirasa tidak cukup sehingga kesejahteraan dan penghasilan dari Prajurit yang perlu diperhatikan dan dinaikkan gajinya.

Eksekusi Yang Telah Dilaksanakan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang bahwa melaksanakan putusan Hakim atau eksekusi dilakukan oleh Oditur Militer, dalam hal ini Oditurat Militer II-09 Semarang. Putusan Hakim memuat pidana Pokok berupa pidana penjara, kurungan maupun denda dan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.

Jumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tahun 2023 adalah sebanyak **54 (lima puluh empat)** perkara dengan data yang telah dilaksanakan eksekusi sejumlah **54 (lima puluh empat)** perkara dan dalam pelaksanaan proses eksekusi tidak ada hambatan karena setiap eksekusi yang dilaksanakan oleh Oditur Militer II-09 Semarang terhadap Terpidana selalu mengirimkan surat pelaksanaan menjalani pidana serta untuk memastikan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan ketentuan undang-undang telah melakukan pengawasan dan pengamatan ke Lembaga Pemasarakatan Militer II Cimahi Jawa Barat.

Program Peningkatan Integritas dan Kapasitas Wilayah Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kapasitas Baik dalam Pembinaan dan Penanganan Terhadap Hakim dan Panitera Yang Bermasalah Serta Koordinasi dengan Komisi Yudisial.

Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selaku pimpinan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) setiap minggu pertama awal 7 bulan berjalan atas kinerja Hakim dalam rangka proses penyelesaian perkara serta kinerja aparatur peradilan Militer II-10 Semarang.

Setiap pagi, dilaksanakan apel pagi dan diambil oleh para hakim, panitera sekretaris selaku pengawas dan selalu menekankan kepada seluruh anggota yang apel untuk menjaga integritas dan marwah Pengadilan Militer II- 10 Semarang dan senantiasa memberikan informasi-informasi yang aktual serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan hukum.

PENJELASAN KEPALA BNN PROVINSI JAWA TENGAH

ANGGARAN

Berdasarkan data sampai dengan 30 November 2023 Total Pagu Anggaran BNNP Jawa Tengah dan BNNK Jajaran adalah sebesar Rp.36.212.215.000,- (*tiga puluh enam milyar dua ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah*).

Realisasi s/d 30 November 2023 adalah Rp.33.434.384.273,- (*tiga puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*) atau sebesar 92.33%.

6 Program Prioritas Nasional pada Tahun 2023 :

1. Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sebanyak 50 Keluarga
2. Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa sebanyak 20 Desa
3. Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba sebanyak 20 Lembaga
4. Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional sebanyak 20 Lembaga
5. SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill (BNNP) sebanyak 2 Lembaga
6. Remaja Teman Sebayu yang Terbentuk (BNNK) sebanyak 90 Orang

Adapun Anggaran yang masih dibutuhkan antara lain sebagai berikut :

1. Renovasi Fasad Gedung BNNP Jawa Tengah sebesar Rp.1.826.998.950,- (*satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
2. Perbaikan Jaringan Listrik, Air dan Internet sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

3. Anggaran Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Alat Olah Data serta Fasilitas Pelayanan Publik.
4. Anggaran P4GN yang berkelanjutan, sehingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat akan terasa secara langsung.
5. Anggaran Peningkatan Kapasitas SDM Internal BNNP/BNNK.
6. Anggaran Peningkatan Kompetensi Teknis Petugas Rehabilitasi.
7. Anggaran Pengembangan Kapasitas Pada Kawasan Rawan Narkoba pada kegiatan Bimbingan Teknis lifeskill bagi masyarakat kawasan rawan narkoba di wilayah perkotaan/pedesaan.

PAGU ANGGARAN TAHUN 2024

Total Pagu Anggaran 2024 BNNP Jawa Tengah dan BNNK Jajaran sebesar Rp.35.947.088.000,- (*tiga puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah*). Mengalami penurunan dari tahun 2023 dengan pagu Rp.36.212.215.000,- (*tiga puluh enam milyar dua ratus dua belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah*) atau selisih sebesar Rp.265.127.000,- (*dua ratus enam puluh lima juta serratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) atau mengalami penurunan sebesar 0.73%.

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2024

Pada Tahun 2024 telah ditetapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024 adalah sebesar Rp.513.400.000,- (*lima ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah*) dengan total target sebanyak 1770 (*seribu tujuh ratus tujuh puluh*) orang.

PENGAWASAN

Dalam rangka mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAN P4GN sesuai dengan amanat Inpres 2 2020, Kepala BNN Jateng rutin mengajak pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan program P4GN yang tujuan akhirnya tidak lain untuk melindungi masyarakat Jawa Tengah dari pengaruh buruk narkoba

BNN Jateng Juga Telah Membina UKM anti narkoba di perguruan tinggi seperti:

1. UNDIP
2. UNNES
3. UDINUS
4. UPGRIS
5. UNTAG
6. UNIMUS
7. UNISULA
8. UNIKA
9. USM
10. UIN
11. WALISONGO

12. UNWIDA
13. UNIVERSITAS NGUDI WALUYO, DLL

BNN Jateng Juga Melakukan kegiatan sosialisasi anti narkoba melalui kegiatan keagamaan seperti:

1. Sholawatan di Wonogiri
2. Sholawatan di Temanggung
3. Sholawatan di Purwokerto
4. Sholawatan di Pekalongan
5. Melalui Khutbah Jum'at

BNN Jateng Juga Melakukan kegiatan sosialisasi anti narkoba melalui media elektronik dan juga bekerja sama dengan media penyiaran seperti seperti:

1. TA TV Surakarta
2. TV KU Semarang
3. Videotron dengan bekerja sama dengan dinas Kominfo
4. RRI Surakarta
5. RRI Semarang
6. RRI Purwokerto
7. Radio Radio Swasta Jawa Tengah

Upaya Yang dilakukan Dalam Pencegahan Masuknya Narkotika

1. Kegiatan Interdiksi Terpadu di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang bersama Angkasa Pura dengan memeriksa bagasi penumpang pesawat menggunakan Unit K9 BNNP Jateng
2. Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penumpang dan barang bawaan kapal pesiar yang sandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang bersama KSOP dan PT. Pelindo
3. Koordinasi berkala dengan Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan secara berkala melakukan operasi gabungan bersama Divisi Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng
4. Koordinasi berkala dengan perusahaan jasa pengiriman ekspedisi untuk mengantisipasi peredaran Narkotika melalui jasa ekspedisi pengiriman
5. Membuat aplikasi pelaporan kejahatan narkotika yang bisa diakses secara online dan memudahkan masyarakat yang akan melaporkan kejahatan narkotika di sekitarnya

Tindak Pidana Narkotika Dan TPPU Narkotika

Selama tahun 2020-2023, BNN Provinsi Jawa Tengah dan jajaran BNN Kabupaten/Kota telah melakukan program pemberantasan tindak pidana narkotika berupa penyidikan tindak pidana narkotika sebanyak 75 kasus (Laporan Kasus

Narkotika/LKN) dengan jumlah Tersangka 127 orang. Sementara barang bukti narkotika yang berhasil disita yaitu :

1. Methamphetamine (sabu) sebanyak 6.541,061 gram (6,54 Kg)
2. Marijuana (ganja) sebanyak 88.430,211 gram (88,4 Kg)
3. Amphetamine (ekstasi) sebanyak 561 butir
4. Sintetic cannabinoid (tembakau gorilla) sebanyak 452,11 gram
5. Permen THC (tetra hidro cannabinol) sebanyak 79 butir
6. Liquid vape mengandung THC (cairan tetra hidro cannabinol) sebanyak 6 mili liter dan
7. Pil Epsilon sebanyak 12 butir

Tindak Pidana Narkotika Dan TPPU Narkotika

Selama tahun 2019-2023, BNN Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari bisnis peredaran gelap narkotika di wilayah Jawa Tengah dengan menetapkan 14 Tersangka dan menyita aset sebesar Rp. 10.328.900.000 yang terdiri dari uang tunai, uang dalam rekening, tanah/rumah, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, emas (logam mulia dan perhiasan), serta binatang hias peliharaan. Aset-aset tersebut sampai dengan putusan pengadilan terakhir (inkrach) disita untuk negara dan selanjutnya dilelang oleh jaksa eksekutor untuk disetor ke kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN kita.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan II Tahun 2023-2024 ke Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah Provinsi Jawa Tengah maka terdapat beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut :

1. Komisi III DPR RI mendukung penuh dan akan memperjuangkan usulan kebutuhan anggaran, usulan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana, serta program kerja dari semua mitra kerja di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan mekanisme yang ada di Komisi III DPR RI dan meminta kepada mitra agar mengoptimalkan anggaran yang ada dalam mencapai target kinerja,
2. Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Polda Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kanwil Jawa Tengah Kemenkumham, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Pengadilan Militer Tinggi II-10 Semarang dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dan menerima penjelasan terkait pencapaian maupun kendala yang dihadapi.

3. Komisi III DPR RI mengapresiasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah atas pelaksanaan kegiatan kamtibmas dan penanganan kasus maupun kesiapan pengamanan dalam menghadapi Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah.
4. Komisi III DPR RI mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan tindak pidana yang telah dilakukan, serta penerapan *restorative justice* yang baik di Provinsi Jawa Tengah.
5. Komisi III DPR RI mengapresiasi Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Pengadilan Militer Tinggi II-10 Semarang atas penanganan perkara yang ditangani serta eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berjalan dengan baik.
6. Komisi III DPR RI mendukung Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum di Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mengatasi permasalahan *over-kapasitas* WBP Lapas/Rutan serta mendukung Kebijakan dalam pemenuhan hak WBP terkait Pemilu 2024.
7. Komisi III DPR Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah atas keberhasilan dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba selama tahun 2022 s.d. 2023 serta program pencegahannya berupa sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan DPR dalam mengambil keputusan.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja
KOMISI III DPR RI,**

Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.